

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA  
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TOJO UNA-UNA***EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY ANALYSIS FOR THE BUDGETING IMPLEMENTATION IN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TOJO UNA-UNA*

Oleh:

**Erika Z. Lasupu<sup>1</sup>  
Lintje Kalangi<sup>2</sup>  
Lidia M. Mawikere<sup>3</sup>**<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

[erikazhav@gmail.com](mailto:erikazhav@gmail.com)[lintjekalangi@unsrat.ac.id](mailto:lintjekalangi@unsrat.ac.id)[lidiamawikere@unsrat.ac.id](mailto:lidiamawikere@unsrat.ac.id)

**Abstrak:** Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi rincian penggunaan anggaran pada 1 tahun periode penganggaran dimana pada laporan tersebut dapat dilihat anggaran digunakan untuk keperluan, kegiatan dan program apa saja, sekaligus dapat dinilai efektivitas dan efisiensi penggunaannya berdasarkan isi dari laporan realisasi anggaran. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una, 2. untuk mengetahui efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode analisis deskriptif yang tujuannya setiap data yang dikumpulkan, dihitung efektivitas dan efisiensinya menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi kemudian ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan tersebut dan jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una, rata rata masuk dalam kriteria efektif dan efisien sesuai dengan tingkat kriteria menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Efisiensi, Anggaran

**Abstract:** Budget realization report is a report that contains details of the use of budget in 1 year budgeting period in which can be seen from the report what necessity, and program the budget is used for budget, as well to assessed effectiveness and efficiencies of its use based on the contents of the budget realization report. The purpose of this research is to find out the effectiveness and efficiencies from the implementation of budget in Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una. The analytical method use in this research is descriptive analysis in which the effectiveness and efficiencies of each data that had been collected was calculated using the ratio of effectiveness and efficiencies then a conclusion is drawn based on the result of the calculation and the type of this research is descriptive quantitative. The result of this research showed that the effectiveness and efficiencies of the budget implementation Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una is included in the criteria of effective and efficient according to the criteria level based on the Decree of the Minister of Home Affairs Number 690.900.327 in 1996.

**Keywords:** Effectivity, Efficiency, Budget Realization Report

## PENDAHULUAN

**Latar Belakang Masalah**

Era globalisasi serta tuntutan reformasi yang semakin meningkat, peran akuntansi sebagai alat pencatatan semakin dibutuhkan. Kepentingan itu tidak hanya diperuntukan untuk pihak manajemen suatu entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban kepada banyak pihak yang memerlukan. Akuntansi telah berkembang seiring dengan perkembangan dunia pemerintahan.

Saat melakukan pembangunan dan pemerataan baik negara maupun daerah, pemerintah tentunya akan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah untuk mewujudkan pembangunan tersebut. Penggunaan anggaran tersebut apabila dilakukan secara efektif dan efisien, akan mewujudkan cita-cita pemerintah yang akan dicapai sesuai dengan rencana strategi yang dibuat oleh pemerintah. Untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah sudah dikatakan efektif dan efisien, bisa dilihat dari laporan realisasi anggaran.

Ulfa (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa efektivitas kinerja anggaran sektor publik adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut mampu mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang diterapkan. Kemudian untuk efisiensi, dalam penelitiannya Ulfa (2018) berpendapat bahwa efisiensi kinerja anggaran sektor publik diukur dengan rasio antara *output* dan *input*. Pengukuran efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas, pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara keluaran yang dihasilkan terhadap masukan yang digunakan. Efisiensi kinerja sektor publik lebih bersifat relatif.

Menurut Trianto (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran adalah bagaimana memanfaatkan uang sebaik mungkin agar dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Secara umum, kelemahan yang sangat menonjol dari anggaran selama ini adalah keterbatasan daerah untuk mengembangkan instrumen teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja, bukan pendekatan incremental yang sangat lemah landasan pertimbangannya. Oleh karenanya, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas. Berkenaan dengan itu, maka penetapan standar kinerja proyek dan kegiatan serta harga satuannya, akan merupakan factor penentu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran. Berikut ini adalah faktor penentuan efektif dan efisien:

1. Faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana;
2. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik struktur maupun fungsional;
3. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan
4. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat. Faktor pimpinan berperan penting dalam mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud. (Rondonuwu, 2011).

Fauziah (2018:99) menyatakan laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LPA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat
- b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD).
- c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una terletak pada provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu instansi pemerintahan yang membantu tugas presiden dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Tentunya dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una menggunakan anggaran belanja dari pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Penggunaan anggaran belanja tersebut dapat dilihat pada laporan realisasi anggaran. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, persentase penggunaan anggaran belanja yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una bervariasi dan cenderung menurun. Dari penurunan persentase tersebut, apakah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik bisa dikatakan efektif dan efisien dalam pelaksanaan anggaran belanja tersebut, karena penggunaan anggaran belanja yang efektif dan efisien akan menunjukkan seberapa berhasilnya organisasi pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah.

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja tahun 2017-2019 pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Akuntansi**

Menurut Sujarweni (2015:1) akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan. Suwardjono (2015:10) menyatakan bahwa akuntansi dapat didefinisikan sebagai seperangkat yang mempelajari perencanaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

### **Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Sujarweni (2015:1) sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik dan tentang penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara lainnya yang sudah diatur dalam hukum. Jadi akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Fauziah (2018:2) menyatakan standar akuntansi pemerintahan berisikan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal mulai berlaku dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, sehingga mempunyai kekuatan hukum.

### **Pengertian Anggaran**

Fauziah (2018:59) mendefinisikan anggaran sebagai pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Sujarweni (2015:32) menyatakan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran dilakukan dalam satu periode dan merupakan satu rangkaian proses yang saling berkaitan. Adapun proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan yaitu:

1. Untuk memberikan bantuan pada organisasi sektor publik agar dapat mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan.
2. Untuk membantu menciptakan efisiensi, efektivitas, dan asas keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses prioritas.
3. Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban manajemen sektor publik.

### Anggaran Sektor Publik

Fauziah (2018:19) menyatakan anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Sujarweni (2015:28) dalam bukunya menyatakan anggaran sektor publik adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik.

### Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Menurut Sujarweni (2015:60) anggaran pendapatan belanja daerah adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Anggaran pendapatan belanja daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran anggaran pendapatan belanja daerah meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

### Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja

Mahmudi (2013:86) menerangkan bahwa, efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Gie (1998:108) menyatakan efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah kota/daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una maka digunakan rumus dari (Mohamad Mahsun, 2009):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, mengenai kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja adalah sebagai berikut:

1. Jika hasil pencapaian melebihi 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

### Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja

Menurut Suparmoko (2007:46) efisiensi dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya ekonomi dengan cara yang paling efektif. Efisiensi akan terwujud apabila dengan sumber daya yang sama dapat menghasilkan lebih banyak dalam jumlah tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Mahmudi (2013:85) menyatakan bahwa efisiensi berkaitan dengan hubungan antara keluaran yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran tersebut. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk mengukur tingkat efisiensi pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una, maka digunakan dari (Mohamad Mahsun, 2009):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, mengenai kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja adalah sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan melebihi 100%, maka anggaran belanja tidak efisien.

2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

### **Penelitian Terdahulu**

Basariyah (2017) dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pada tahun 2011-2015 secara keseluruhan termasuk kriteria efektif, sedangkan rasio efisiensi bervariasi rata-rata menunjukkan kriteria cukup efisien.

Pangkey (2016) dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas dan efisien keseluruhan dari tahun 2010-2014 tidak efektif dan tidak efisien.

Sumenge (2013) dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2010 dan terendah pada tahun 2011. Tingkat efisiensi tahun 2008-2011 sangat efisien dan tahun 2012 termasuk efisien.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu keadaan secara objektif.

### **Tempat Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una pada tanggal 15 bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Mei tahun 2020.

### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dalam skala numerik atau data yang dapat dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa dokumen laporan realisasi anggaran belanja tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una.

### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data ini diperoleh langsung dan bersumber dari data laporan realisasi anggaran belanja tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una.

### **Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una, yaitu:

#### **1. Perhitungan Tingkat Efektivitas**

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah kota/daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una maka digunakan rumus dari (Mohamad Mahsun, 2009):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria rasio efektivitas berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan, sebagai berikut:

**Tabel 1. Kriteria Efektivitas**

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Dibawah dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

## 2. Perhitungan Tingkat Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk mengukur tingkat efisiensi pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una, maka digunakan dari (Mohamad Mahsun, 2009):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria rasio efisiensi berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan sebagai berikut:

**Tabel 2. Kriteria Efisiensi**

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Dibawah dari 60%	Sangat efisien

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una, yang ditindaklanjuti dengan keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2004 Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam perkembangannya dimana beban tugas yang semakin besar pada era otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab ini, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan organisasi pemerintahan di Kabupaten Tojo Una-Una.

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial serta pembantuan yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah provinsi Sulawesi Tengah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh bupati
- Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan dan pelayanan umum sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Pembinaan teknis, pengelolaan bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
- d. Penyusunan program, inventarisasi, penyediaan sarana, penyalarsan dan perawatan serta pengawasan penggunaan sarana kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
- e. Memantau dan mengendalikan tugas pokok yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan badan.
- g. Pembinaan UPT (Unit Pelaksana Teknis) badan dan kelompok jabatan fungsional.

### Hasil Penelitian

#### 1. Hasil Perhitungan Analisis Efektivitas Anggaran Belanja

**Tabel 3. Realisasi Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2019**

Tahun	Target Anggaran	Realisasi
2017	3.369.093.310,00	3.344.013.716,00
2018	3.520.883.194,00	3.485.042.165,00
2019	4.188.693.323,00	3.955.601.891,00

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Tojo Una-Una

Berdasarkan tabel realisasi anggaran belanja diatas, dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas tahun 2017} = \frac{3.344.013.716,00}{3.369.093.310,00} \times 100\% = 99,25\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2018} = \frac{3.485.042.165,00}{3.520.883.194,00} \times 100\% = 98,98\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2019} = \frac{3.955.601.891,00}{4.188.693.323,00} \times 100\% = 94,43\%$$

#### 2. Hasil Perhitungan Analisis Efisiensi Anggaran Belanja

**Tabel 4. Anggaran Belanja Langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2019**

Tahun	Target Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Belanja Langsung	Persentase
2017	1.737.919.443,00	1.175.105.954,00	99%
2018	1.580.119.307,00	1.569.359.021,00	99%
2019	1.496.286.850,00	1.490.153.359,00	100%

Sumber: Badan Kesbangpol Kabupaten Tojo Una-Una

Berdasarkan tabel realisasi anggaran belanja langsung diatas, dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi tahun 2017} = \frac{1.175.105.954,00}{1.737.919.443,00} \times 100\% = 51,28\%$$

$$\text{Efisiensi tahun 2018} = \frac{1.569.359.021,00}{1.580.119.307,00} \times 100\% = 45,03\%$$

$$\text{Efisiensi tahun 2019} = \frac{1.490.153.359,00}{1.496.286.850,00} \times 100\% = 37,67\%$$

### Pembahasan

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Basariyah (2017) dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, juga penelitian dari Pangkey (2016) dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dan penelitian dari Sumenge (2013) dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan dimana perhitungan dengan menggunakan rasio efektivitas oleh Mohamad Mahsun (2009) mampu menggambarkan bagaimana suatu badan atau organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut disajikan tabel untuk melihat berapa besar tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una.

## 1. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una.

**Tabel 5. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2019**

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Efektivitas(%)	Kriteria
2017	3.369.093.310,00	3.344.013.716,00	99,25%	Efektif
2018	3.520.883.194,00	3.485.042.165,00	98,98%	Efektif
2019	4.188.693.323,00	3.955.601.891,00	94,43%	Efektif

Sumber: Badan Kesbangpol Kabupaten Tojo Una-Una

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas dari tahun ketahun bervariasi cenderung menurun tetapi masih dalam kriteria efektif, tingkat efektivitas tertinggi berada pada tahun 2017 99,25%, kemudian diikuti tahun 2018 98,98%, dan terakhir adalah pada tahun 2019 94,43%.

## 2. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una.

**Tabel 6. Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2019.**

Tahun	Realisasi Belanja Langsung	Realisasi Belanja	Tingkat Efisiensi	Kriteria
2017	1.715.105.954,00	3.344.014.716,00	51,28%	Sangat Efisien
2018	1.569.359.021,00	3.485.042.165,00	45,03%	Sangat Efisien
2019	1.490.153.359,00	3.955.601.891,00	37,67%	Sangat Efisien

Sumber: Badan Kesbangpol Kabupaten Tojo Una-Una

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi bervariasi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, tingkat efisiensi tertinggi berada pada tahun 2019 37,67%, kemudian diikuti tahun 2018 45,03%, dan terakhir tahun 2017 sebesar 51,28%.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari penelitian mengenai Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat atau kriteria efektivitas pada tahun anggaran 2017-2019 pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una dari tahun ke tahun menurun tetapi masih berada dalam kriteria efektif, dimana pada tahun 2017 tingkat efektivitas sebesar 99,25%, kemudian pada tahun 2018 menurun sebesar 98,98%, dan pada tahun 2019 menurun sebesar 94,43%. Dengan target anggaran belanja yang terus meningkat dari tahun 2017-2019 dan terdapat 1 program yaitu program peningkatan sumber daya aparatur yang tidak terlaksana, tetapi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una tetap mampu mencapai kriteria efektif.
2. Tingkat atau kriteria efisiensi pada Badan Kesatuan bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una secara keseluruhan sudah termasuk dalam kriteria efisien, dimana pada tahun 2017 tingkat efisiensi sebesar 51,28%, kemudian pada tahun 2018 meningkat sebesar 45,03%, dan pada tahun 2019 meningkat lagi sebesar 37,67%. Tingkat efisiensi yang terus menerus meningkat dari tahun ke tahun.

### Saran

1. Untuk Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una, diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya agar Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una dapat melakukan perencanaan dan pertimbangan yang lebih baik dan matang dalam proses penganggaran agar tidak ada lagi anggaran yang tidak terpakai sehingga penyerapan anggaran belanja pada setiap program dapat terealisasi secara menyeluruh.
2. Untuk efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una sudah sangat baik, dan hanya perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basariyah, Siti. (2017). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa (BPMD) Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis* 5(6):63-74. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/9605/7627>
- Fauziah, Ifat. (2018). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Cetakan Pertama. Ilmu. Jakarta.
- Gie, The Liang. (1998). *Cara Belajar Yang Efisien*. Jilid II Edisi 4. Bandung.
- Mahsun, M. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi ilmu Manajemen YKPN.
- Pangkey, Imanuel. (2016). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA* 3(4) 133-43. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10581/10168>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rondonuwu, Ritno H. (2015). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA* 3(4) 001-142. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10580/10167>
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Kedua. Pustaka Baru. Yogyakarta.
- Sumenge, Ariel S. (2013). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA* 1(3) 74-81. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1941>
- Suparmoko. (2007). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. BP2E. Yogyakarta.
- Suwardjono. (2015). *Akuntansi Perekayasaan pelaporan Keuangan*. BP2E. Yogyakarta.
- Trianto, A. 2016. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palembang. *Jurnal Akuntansi Akusisi* 12(1) 65-77. <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/92>
- Ulfa, Siti M. (2018). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Medan. *SKRIPSI*. Universitas Medan Area. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9915>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4342. Jakarta.